PEGAWASAN OPERASIONAL GELANGGANG PERMAINAN DI KOTA PEKANBARU

Oleh : Joni Arini Muliadi

jonimuliadi1107@gmail.com

Pembimbing : Dra. Enawati, M.Si

Program Studi Administrasi Publik - Jurusan Ilmu Administrasi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

To overcome the issue of public entertainment in the city of Pekanbaru, the Pekanbaru city government took a concrete step by issuing one of the policies governing entertainment in the city of Pekanbaru, namely Regional Regulation Number 3 of 2002 concerning General Entertainment in the City of Pekanbaru. One of them is the game arena. This regulation aims to limit the playing field, so that in carrying out its business activities it does not harm, harm, and disturb the community, especially the surrounding environment. Based on the research that the authors did in the field, there are still playing fields that do not comply with the Regional Regulations that have been made by the Pekanbaru City Government. The purpose of this study was to find out how the operational supervision of the playing field in the city of Pekanbaru and to find out the inhibiting factors that affect the supervision. This research was conducted in the city of Pekanbaru by using a qualitative descriptive method, the data were collected through observation and interviews. This research was carried out using the Manullang theory, which set standards, made judgments, and made corrective actions. The conclusion of this research is that the supervision carried out by the Pekanbaru City Civil Service Police Unit has not been carried out effectively, this is based on the fact that there are still many playing fields that violate the regulations made by the Pekanbaru City government. This happens because the efforts made in the supervision process are not optimal in terms of human resources, sanctions, and awareness of the business owner itself.

Keywords: Arena Games, Operations, Supervision

PENDAHULUAN

Permainan merupakan kegiatan yang sering dilakukan oleh sebagian besar manusia, baik anak kecil, dewasa, maupun orang tua, sehingga permainan selalu dilakukan sebagai penghilang rasa jenuh untuk sebagian orang dewasa.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru yang mengatur tentang berbagai jenis hiburan terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 03 Tahun 2002 tentang Hiburan Umum dibuat dalam rangka untuk mengatur dan menertibkan kegiatan usaha hiburan, dan apabila tidak bisa diatur maka akan digunakan sifat memaksa, mau tidak mau maka para pengusaha hiburan umum harus mentaati segala isi peraturan daerah tersebut dan apabila ternyata masih ditemukan adanya pelanggaran maka akan dikenakan sanksi.

Perkembangan sektor hiburan merupakan salah satu sektor yang mengalami perkembangan di Kota Pekanbaru, hal ini tentu saja membawa konsekuensi logis baik yang bersifat positif maupun negatif. Sebagai daerah yang sedang mengalami perkembangan Kota Pekanbaru tentu saja memiliki banyak tempat-tempat hiburan dari berbagai kelas.

Salah satu tempat hiburan yang berkembang pesat saat ini di Kota Pekanbaru adalah gelanggang permainan. Keberadaan tempat hiburan ini secara langsung atau tidak langsung memberikan kontribusi bagi pendapatan masyarakat dan pendapatan daerah di Kota Pekanbaru. Namun pemerintah perlu melakukan antisipasi agar keberadaan tempat hiburan ini tidak disalahgunakan.

Kehadiran tempat-tempat hiburan umum di Kota Pekanbaru ini memerlukan pengaturan yang jelas, sebagai kota yang sedang berkembang menuju kota metropolitan.

Dari penelitian lapangan yang penulis lakukan, adapun pelanggaran yang sering terjadi yaitu pelanggaran jam operasional. Dimana gelanggang permainan yang beroperasi melampaui batas jam operasional yang telah ditentukan dalam Perda No. 3 Tahun 2002. Pelanggaran jam operasional ini tentunya dapat meresahkan bagi masyarakat yang bermukim di sekitar lokasi gelanggang permainan. Apabila pelanggaran tersebut dibiarkan maka akan menimbulkan dampak sosial pada masyarakat, serta terganggunya ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Hal ini terjadi karena pengawasan yang lemah oleh pemerintah Kota Pekanbaru, molornya jam operasional tempat hiburan umum gelanggang permainan (geleper) Kota Pekanbaru dapat menimbulkan efek negatif terhadap konsumen, karena tidak dapat dipungkiri bahwa konsumen atau pengunjung yang datang terdapat anak-anak dan remaja.

Maka dari fenomena-fenomena di atas penulis bermaksud ingin melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul "*Pengawasan Operasional Gelanggang Permainan di Kota Pekanbaru*"

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengawasan Operasional Gelanggang Permainan di Kota Pekanbaru?
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pengawasan Operasional

Gelanggang Permainan di Kota Pekanbaru ?

KONSEP TEORI

1. Manajemen

Menurut Haiman dalam Manullang (2001:3) mengatakan manajemen merupakan fungsi untuk mencapai sesuatu melalui kegiatan orang lain dan mengawasi usaha-usaha individu, untuk mencapai tujuan bersama. Sementara Winardi (2000:24), mengungkapkan manajemen merupakan proses yang khas terdiri dari tindakan-tindakan *planning, organizing, actuating, dan controlling*, dimana pada masing-masing bidang digunakan baik pengetahuan umum, maupun keahlian dan yang diakui secara beruntun dan dalam rangka usaha dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

2. Pengawasan

Yahya (2006:133) pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang erat antara perencanaan dan pengawasan.

Untuk dapat melaksanakan pengawasan maka harus dilalui beberapa tahap atau langkah dari pengawasan tersebut. Menurut Manullang (2008:185) proses pengawasan tersebut terdiri dari :

1. Menetapkan standar
2. Mengadakan penilaian
3. Melakukan tindakan perbaikan

METODE PENELITIAN

Untuk melihat, mengetahui serta melukiskan keadaan yang sebenarnya secara rinci dan aktual

dengan melihat masalah dan tujuan penelitian seperti yang telah disampaikan sebelumnya, maka metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini jelas mengarah pada penggunaan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti.

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru, dengan mengambil tempat penelitian pada kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dengan tujuan untuk meneliti Pengawasan Operasional Gelanggang Permainan.

2. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang menjadi sumber data dalam penelitian atau orang yang memberikan keterangan kepada peneliti. Informan adalah suatu istilah yang memberikan data dalam bentuk informasi kepada peneliti. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* dimana penentuan informan berdasarkan pertimbangan bahwa informan yang dipilih adalah orang-orang yang mengetahui dan terlibat yang telah ditentukan sebelumnya Sugiyono (2014:85).

3. Jenis Dan Sumber Data

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini jelas mengarah pada penggunaan metode penelitian kualitatif.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil pengamatan penelitian yang berkaitan langsung dalam

permasalahan yang dihadapi yaitu Pengawasan Operasional Gelanggang Permainan di Kota Pekanbaru serta informan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

b. Data Skunder

Data yang diperoleh dan diperlukan untuk mengumpulkan data yang sudah ada berupa dokumen, buku-buku atau catatan yang sesuai dengan subjek penelitian. Data tersebut berupa rekap izin gelanggang permainan, visi dan misi organisasi, tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Agar penelitian mendapatkan gambaran selengkap mungkin, maka peneliti mengadakan pengamatan dan mencatat secara sistematis terhadap gejala dan fenomena yang ada di lapangan. Observasi ini yaitu pengamatan langsung pada objek yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpul data dan informasi melalui percakapan langsung atau dikenal dengan interview atau wawancara antara peneliti dengan narasumber. Wawancara yang mendalam untuk menggali informasi sedetail mungkin. Wawancara

dilakukan dengan informan yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini.

c. Studi Literatur

Studi literature adalah teknik pengumpulan data dan informasi melalui buku-buku, referensi-referensi dari hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan penelitian atau dapat juga diambil dari beberapa dokumen mengenai gambaran umum lokasi penelitian seperti dalam perda atau perwako serta hal-hal lain yang dapat mendukung hasil penelitian.

d. Dokumentasi

Herdiansyah (2010:143) dokumentasi adalah salah satu pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Dokumentasi dapat memberikan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis atau lainnya yang berkaitan dengan Pengawasan Operasional Gelanggang Permainan di Kota Pekanbaru.

5. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiono (2012:89) analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh melalui hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. Adapun teknik analisa

yang penulis gunakan adalah metode deskriptif kualitatif yang dimana memaparkan peristiwa yang terjadi. Penelitian ini tidak menjelaskan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi.

HASIL PENELITIAN

1. Pengawasan Operasional Gelanggang Permainan Di Kota Pekanbaru

Untuk dapat melaksanakan pengawasan maka harus dilalui beberapa tahap atau langkah dari pengawasan tersebut. Menurut Manullang (2008:185) proses pengawasan tersebut terdiri dari :

- a. Menetapkan standar
- b. Mengadakan penilaian
- c. Melakukan tindakan perbaikan

Selanjutnya penulis akan menjelaskan berbagai masing-masing indikator menurut hasil yang telah di dapatkan dalam penelitian ini :

1. Menetapkan Standar

a. Kuantitas

Kuantitas merupakan penjelasan tentang jumlah personel Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru yang bertugas melakukan pengawasan di lapangan. Berdasarkan wawancara dapat diketahui bahwa jumlah personil yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru sangat terbatas dan kurang memadai. Hal ini tentunya berpengaruh terhadap pengawasan operasional gelanggang permainan di Kota Pekanbaru. Kurangnya jumlah personil tersebut membuat pergerakan petugas menjadi terbatas dan pengawasan yang dilakukan menjadi tidak efektif.

b. Kualitas

Kualitas adalah bagaimana proses pengawasan dilapangan sesuai dengan prosedur dan standar yang telah ditetapkan. Kualitas merupakan hal yang sulit diukur

secara empiris, namun pada penelitian ini penulis melakukan pengukuran dengan SOP Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru sebagai acuan. Hal ini tercanum dalam SOP Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru pada poin II Nomor 4 yang membahas tentang “Tahap, Bentuk dan Cara Pelaksanaan Pembinaan” bentuk cara pembinaan ketertiban dan ketentraman masyarakat adalah berupa produk hukum yang tidak ditaati masyarakat, terutama Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Perundang-Undangan lainnya dalam menjalankan roda pemerintahan di daerah kepada masyarakat.

c. Waktu

Waktu pelaksanaan proses pengawasan merupakan salah satu pertimbangan yang harus diperhatikan. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dilapangan, pelaksanaan razia dilakukan pada waktu tertentu.

Razia tersebut terbagi menjadi dua yaitu razia yang di jadwalkan dan razia yang tidak dijadwalkan. Razia yang dijadwalkan seperti razia gabungan yang bekerjasama dengan Polri, TNI dan instansi terkait lainnya, serta razia tahunan yang dijadwalkan pada saat bulan puasa. Sedangkan razia yang tidak dijadwalkan berupa perintah langsung dari atasan hal ini biasanya terjadi pada situasi tertentu. Satuan Polisi Pamong Praja juga melakukan razia yang tidak dapat ditentukan waktunya karena razia merupakan inspeksi yang bersifat rahasia. Hal ini dilakukan untuk menghindari kebocoran saat akan melakukan razia.

2. Mengadakan Penilaian

a. Laporan dari bawahan kepada atasan

Pelaporan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh bawahan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan. Pelaporan dilakukan kepada atasan kepada siapa bawahan tersebut bertanggung jawab. Laporan merupakan jawaban dari kegiatan pengawasan. Laporan tidak dibawa langsung oleh atasan pada waktu mengadakan pengawasan, tetapi diantar oleh bawahan baik dibawa sendiri maupun dikirimkan.

Dalam menetapkan standar pengawasan gelanggang permainan di Kota Pekanbaru, unit yang melakukan pengawasan dalam bentuk razia harus memberikan laporan kepada atasan mengenai kegiatan yang telah dilakukan.

b. Kontrol yang dilakukan atasan

Selain berupa laporan yang dilakukan oleh bawahan kepada atasan dalam kegiatan pengawasan operasional gelanggang permainan adapula berupa kontrol yang dilakukan atasan. Hal ini perlu dilakukan untuk melihat bagaimana proses pengawasan yang dilakukan para anggota.

Pihak atasan selalu memberikan pengarahan mengenai tujuan kegiatan razia yang akan dilakukan, selain itu segala tindakan yang akan dilakukan dipangangan harus sesuai prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. Untuk kontrol pasca kegiatan dilakukan dengan cara evaluasi kerja, apabila ada anggota yang melakukan pelanggaran terhadap SOP yang telah ditentukan, maka anggota tersebut dikenakan sanksi pelanggaran.

3. Melakukan tindakan perbaikan

a. Mengetahui penyimpangan yang terjadi

Hasil wawancara menunjukkan bahwa untuk mengetahui penyimpangan yang terjadi adanya laporan langsung oleh masyarakat kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.

b. Perbaikan pada penyimpangan

Dengan dilakukannya perbaikan terhadap penyimpangan diharapkan agar penyimpangan tersebut tidak terjadi kembali. Dari hasil wawancara penulis menyimpulkan bahwa perbaikan pada penyimpangan dilakukan dengan cara memberikan pengertian atau pemahaman secara langsung kepada pihak yang melakukan pelanggaran yaitu pemilik gelanggang permainan. Namun berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, tindakan perbaikan yang dilakukan masih jauh dari kata optimal karena hingga saat ini pelanggaran masih sering dilakukan oleh gelanggang permainan.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengawasan Operasional Gelanggang Permainan Di Kota Pekanbaru

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia merupakan penggerak atau pelaksana nyata dari hal-hal yang telah direncanakan. Sehingga kecukupan dan kekurangan dari sumber daya manusia sangat berpengaruh dalam proses pelaksanaan pekerjaan. Sumber daya manusia dalam proses pengawasan ini adalah kuantitas atau jumlah pegawai dinas terkait

yang melakukan pengawasan tempat hiburan umum gelanggang permainan .

Jumlah anggota yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja dikatakan masih sangat terbatas dimana dari total 150 personel yang turun tersebut melakukan seluruh kegiatan pengawasan baik di tempat hiburan umum, pedagang kaki lima dan lain sebagainya. Dimana cakupan tersebut sangat luas, mengingat jumlah gelanggang permainan yang tersebar diberbagai kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru.

Agar pengawasan operasional tersebut dapat dilakukan secara maksimal, dibutuhkan setidaknya 30 orang perkecamatan untuk melakukan pengawasan. Kemudian perlunya pembagian tugas pengawasan tempat hiburan umum, pedagang kaki lima, reklame, gepeng dan lainnya sebagainya.

b. Sanksi Kurang Tegas

Memberikan sanksi dimaksudkan agar timbulnya efek jera pada pelanggar tersebut dan tidak mengulangi kembali pelanggaran yang sama dikemudian hari. Pemberian sanksi tersebut sudah semestinya dilakukan dengan tegas dan tanpa pandang bulu serta sesuai dengan SOP yang telah ditentukan.

c. Kurangnya Kesadaran Pemilik Usaha

Kurangnya kesadaran dari pemilik tempat hiburan umum gelanggang permainan terhadap peraturan yang berlaku terlihat dengan masih banyaknya gelanggang permainan yang melanggar peraturan dan bahkan cenderung melakukan pelanggaran kembali.

Pelanggaran yang dilakukan kembali tersebut merupakan bentuk

dari kurang tegasnya pemerintah dalam melakukan pengawasan dan pemberian sanksi bagi gelanggang permainan yang melakukan pelanggaran.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dan telah diuraikan diatas mengenai Pengawasan Operasional Gelanggang Permainan di Kota Pekanbaru. Berdasarkan 3 indikator yang penulis jadikan sebagai acuan dalam melakukan penelitian maka diperoleh kesimpulan dari indikator-indikator yang digunakan yaitu sebagai berikut :

1. Pengawasan operasional gelanggang permainan di Kota Pekanbaru belum berjalan sesuai dengan yang telah diamanatkan didalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hibran Umum. Ini terlihat dari banyaknya gelanggang permainan yang melanggar peraturan daerah tersebut. Sanksi yang diberikan Pemerintah Kota Pekanbaru terhadap gelanggang permainan yang melakukan pelanggaran dinilai kurang tegas karena dianggap tidak menimbulkan efek jera terhadap pemilik gelanggang permainan.
2. Adanya faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan operasional gelanggang permainan di Kota Pekanbaru diantaranya :
 - a. Sumber daya manusia :
Jumlah anggota yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang melakukan pengawasan dilapangan adalah 150 orang, yang mana jumlah tersebut tidak hanya fokus

mengawasi gelandang permainan saja. Sementara jumlah yang seharusnya adalah 30 orang perkecamata dan dibatasi objek pengawasannya. Selanjutnya kurangnya pengalaman yang dimiliki personel Satpol PP Kota Pekanbaru dalam melakukan pengawasan tempat hiburan umum gelandang permainan, bagi yang berpengalaman tentunya sudah mengetahui cara untuk mengatasi penangan gelandang permainan dan bagi personil yang belum berpengalaman tentunya manjadi pengalaman bagi mereka untuk menjadi pengawas, karena sejauh ini pengawasan yang dilakukan hanya pada waktu tertentu saja tidak secara kontiniu.

b. Sanksi kurang tegas

Ketegasan sanksi merupakan hal yang sangat diperlukan agar pelanggaran tidak terjadi secara terus-menerus selama itu masih sesuai dengan SOP yang telah ditentukan. Namun ketegasan sanksi hanya akan dapat dilakukan apabila memang telah terjadi kesepakatan antara pihak pemerintah kota dan para pengusaha tempat hiburan umum gelandang permainan ini telah mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak.

c. Kurangnya kesadaran pemilik usaha

Rendahnya kesadaran yang dimiliki oleh pemilik gelandang permainan, hal ini dilahat dari tidak adanya perubahan bahkan cenderung

melakukan pelanggaran kembali. Pelanggaran yang dilakukan kembali tersebut merupakan bentuk dari kurang tegasnya pemerintah dalam melakukan pengawasan dan pemberian sanksi bagi gelandang permainan yang melakukan pelanggaran.

2. Saran

Adapun saran dari penulis dalam penelitian skripsi ini mengenai Pengawasan Usaha Wisata Hiburan Oleh Pemerintah Kota Dumai Studi Kasus Tentang Usaha Karaoke adalah sebagai berikut :

1. Perlunya peningkatan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru terhadap gelandang permainan dengan melakukan pengawasan yang baik dan tegas dalam pemberian sanksi.
2. Pemerintah yang menjalankan pengawasan terhadap tempat hiburan umum gelandang permainan ini harus menjalin komunikasi yang baik satu sama lain, sehingga proses pengawasan dapat terlaksana dengan efektif. Serta meningkatkan koordinasi dengan instansi pemerintah lainnya yang bertanggung jawab atas pengawasan operasional gelandang permainan tersebut, agar dalam pelaksanaannya masing-masing instansi mengetahui tugas dan fungsinya masing-masing.
3. Diperlukannya ketegasan dari pemerintah dalam memberikan sanksi bagi gelandang permainan yang jelas-jelas melanggar aturan yang dapat menjadi penghambat bagi

tercapainya tujuan yang ingin dicapai pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Brantas. 2009. *Dasar-dasar Manajemen*. Bandung: Alfabeta
- Dharma, S.S. 2004. *Manajemen Pemerintah Indonesia*. Jakarta: PT. Djaniabar
- Hany, Handoko T. 2003. *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE
- Hasibuan. 2002. *Manajemen; Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara
- Indrajit, Eko Richardus. 2014. *Manajemen Organisasi dan Tata Kelola Teknologi Informasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Maman, Ukas. 2004. *Manajemen Konsep, Prinsip dan Aplikasi*. Bandung: Agnini
- Manullang, M. 2008. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Maringan. 2004. *Dasar-dasar Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Moleong, J, Lexy. 2004 *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Mulyadi. 2007. *Pengantar Manajemen*. Pekanbaru: Unri Press
- Noor, Juliansyah. 2003. *Penelitian Ilmu Manajemen; Tinjauan Filosofis dan Praktis*. Jakarta: Fajar Interpratama
- Relawati, Rahayu. 2012. *Dasar Manajemen*. Malang: UMM Press
- Ritonga, Hasnun Jauhari. 2015 *Manajemen Organisasi Pengantar Teori dan Praktek*. Medan: Perdana Publishing
- Sarwoto. 2002. *Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Siagian, Sondang P. 2005. *Fungsi-Fungsi Manajerial*. Jakarta: Bumi Aksara
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Sukanto. 2007. *Dasar-dasar Manajemen Edisi 5*. Yogyakarta: Andi
- Sule dan Tisnawati. 2005. *Pengantar Manajemen Edisi I*. Jakarta: Fajar Interpratama Offset
- Tangkilisan. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta: PT. Grasindo
- Usman, Husaini. 2008. *Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Yahya, yohannes. 2006. *Pengantar manajemen*. Yogyakarta: Graha ilmu

2. Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 03 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum

3. Skripsi

- Dista Khoesnul Ardiansyah :
Pengawasan Tempat Karoke Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru. Tahun 2015